

# MANAJEMEN KEUANGAN PENDIDIKAN (Analisis Investasi Pendidikan)

Yuspiani<sup>1</sup>, M. Hidayat<sup>2</sup>

<sup>1</sup>UIN Alauddin Makassar, <sup>2</sup>UIN Datokarama Palu

Email: yuspiani.uinalauddinmakassar@gmail.com, tetta01file@gmail.com

## (Article History)

Received February 18, 2022; Revised March 20, 2022; Accepted May 31, 2022

### **Abstract: Educational Financial Management (Educational Investment Analysis)**

*The purpose of this study is to analyze and examine the financial management of education from a critical point of view, especially regarding how much the analysis of the benefits of education costs as one of the considerations in making investment policies. The research method used is qualitative with a library research approach, from the data that has been collected and analyzed, the results show that quality education is expensive. The high cost of education requires effective and efficient financial management so that it can be used as one of the considerations in making investment decisions. The investment decisions taken indicate that the education costs incurred have benefits. The cost benefit analysis of education is represented in the form of a ratio between the present value of the costs and the present value of the benefits that will be obtained in the future. On the other hand. The high cost of education indicates the existence of privatization in the field of education which has resulted in educational institutions having the autonomy to determine their own cost of providing education, for that some parents of students need to understand the analysis of the benefits of education costs before taking investment policies in the education sector for the future of their children.*

**Keywords:** Financials Management, Present Value, Investment

### **Abstrak: Manajemen Keuangan Pendidikan (Analisis Investasi Pendidikan)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji manajemen keuangan pendidikan sudut pandang kritik khususnya yang berkaitan dengan seberapa besar analisis manfaat biaya pendidikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan investasi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan *library research*, dari data yang telah dikumpulkan dan dianalisis maka hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan yang berkualitas itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan mengharuskan adanya pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien sehingga dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Keputusan investasi yang diambil menandakan bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan memiliki manfaat. Analisis manfaat biaya pendidikan direpresentasikan dalam bentuk rasio antara *present value* dari biaya dengan *present value* dari manfaat yang akan didapatkan pada masa yang akan datang. Mahalnya biaya pendidikan mengindikasikan adanya privatisasi di bidang pendidikan yang mengakibatkan lembaga pendidikan memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan

pendidikan, untuk itu sebagian orang tua peserta didik perlu memahami analisis manfaat biaya pendidikan sebelum mengambil kebijakan investasi disektor pendidikan untuk masa depan buah hati.

**Kata Kunci:** Manajemen Keuangan, *Present Value*, Investasi

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan manusia. Oleh karena itu, perlu dukungan keuangan yang bersumber dari pemasukan kas negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta 20% dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional (Syauqi, 2009). Sumber berikutnya berasal dari masyarakat, pada prinsipnya lembaga pendidikan bukanlah entitas yang mendatangkan keuntungan. Namun, secara konseptual masyarakat memiliki tanggung jawab untuk ikut meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan pendidikan secara profesional. Namun dalam kenyataannya, sebagian masyarakat khususnya orang tua siswa merasakan efek biaya pendidikan yang terus mengalami peningkatan setiap memasuki tahun ajaran baru.

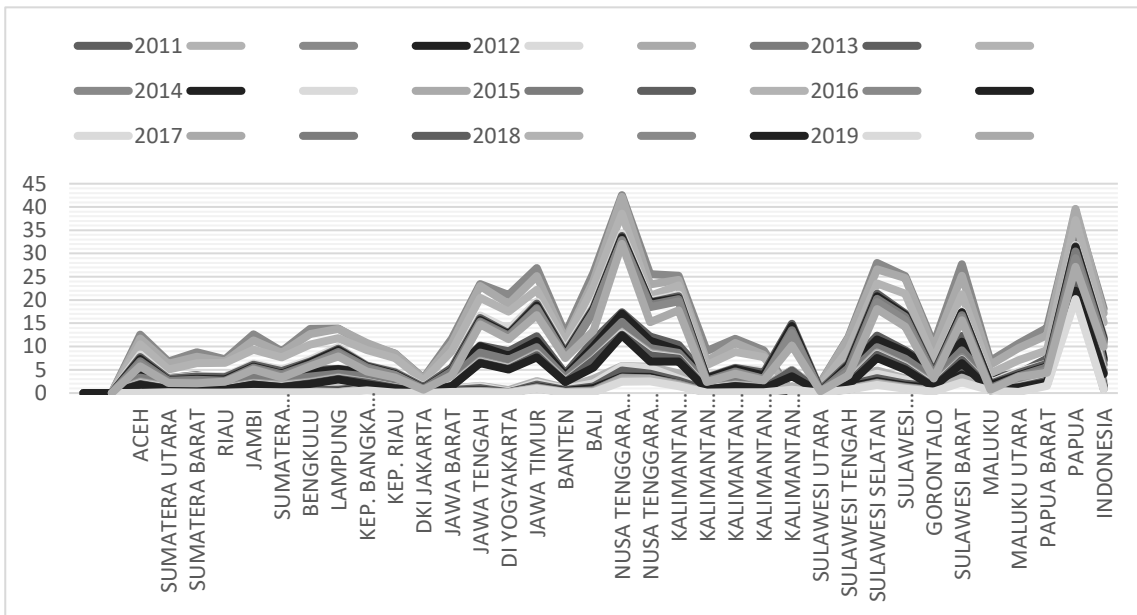
Pada umumnya setiap tahun ajaran baru, ada beberapa variabel yang secara tidak langsung mempengaruhi biaya pendidikan, seperti biaya perlengkapan sekolah, SPP/uang pangkal dan lain sebagainya, belum lagi akumulasi biaya hidup yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, perlu pengelolaan keuangan yang cukup efisien dan efektif, sehingga keputusan keuangan yang diambil tidak terlalu berisiko besar.

Pengelolaan keuangan secara efisien dan efektif dapat dijumpai dalam kajian manajemen keuangan. Iskandar (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa Manajemen Keuangan adalah proses pengaturan terhadap fungsi-fungsi keuangan oleh ketatausahaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai pertanggungjawaban keuangan. Namun, jika dihubungkan dengan lembaga pendidikan pengaruhnya cukup signifikan. Hal tersebut diakui oleh Najihah & Muhammad (2021) dalam kajian teorinya mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan hal yang sangat penting dilakukan di sekolah sehingga kegiatan disekolah menjadi teratur. Kemudian Mulyono (2010) juga mengakui bahwa pendidikan tanpa dukungan keuangan mengakibatkan proses pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Hal senada juga dijelaskan oleh Diana (2019) bahwa untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan salah satu variabel pentingnya adalah keuangan.

Keuangan menjadi salah satu variabel penting dalam pendidikan, maka untuk mengetahui apakah aspek tersebut sudah cukup memuaskan atau tidak.

Arwildayanto & Lamatenggo (2017) berpendapat bahwa ada tiga perspektif yang dapat digunakan untuk melihat hal tersebut. Pertama proporsi dari kelompok usia, jenis kelamin tingkat buta huruf. Kedua distribusi alokasi sumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam mensubsidi layanan pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya dan ketiga dukungan orang tua siswa dan masyarakat sebagai komponen yang strategis dalam membiayai pendidikan.

Data badan pusat statistik mencatat persentase penduduk yang buta huruf di seluruh Indonesia menurut kelompok umur mulai dari Tahun 2011 sampai 2019 menunjukkan grafik seperti dalam Gambar 1.



**Gambar 1. Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur mulai Tahun 2011 - 2019**

Sumber: BPS-File (2022)

Data dalam Gambar 1 menunjukkan, BPS memberikan catatan bahwa kenaikan angka buta huruf, jika dibandingkan pada Tahun 2010 dan 2011 lebih disebabkan perbedaan metodologi penghitungan estimasi. Tahun 2010, penghitungan *inflate* tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan, sedangkan pada Tahun 2011 penghitungan *inflate* didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan. Selain itu, pengumpulan data pada Tahun 2010 dilakukan hanya satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada Tahun 2011 dilakukan per-triwulanan. Hal ini mempengaruhi penghitungan indikator pendidikan karena tahun ajaran sekolah dimulai pada bulan Juli dan berakhir di bulan Juni tahun berikutnya. Data di Tahun 2011-2017 diestimasi dengan menggunakan *inflate* hasil *back-casting* berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia di Tahun 2010–2035.

Data tersebut di atas menunjukkan tingginya persentase buta huruf dapat menghambat banyak aspek, salah satunya dari segi pengetahuan karena untuk

mengaksesnya diperlukan kemampuan literasi. Kemudian, itu sudah berbanding lurus dengan 20% anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dari APBN dan APBD atau dari masyarakat untuk pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkajinya ke dalam paradigma kritik khususnya yang berkaitan dengan manfaat biaya pendidikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*, sementara jika dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif yang berfokus pada penjelasan sistematis terhadap fakta yang diperoleh. Sementara data yang dikumpulkan bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Kriteria sumber data yang digunakan antara lain buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Biaya Pendidikan

Konsep biaya dalam istilah ekonomi umumnya dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pengorbanan yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan (Diana, 2019). Penjelasan tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa Pengeluaran atau Pengorbanan yang dilakukan nantinya akan mendapatkan hasil. Menurut Buchana (dalam Arwildayanto, Lamatenggo, 2017) menjelaskan bahwa Pengeluaran atau Pengorbanan yang dilakukan dapat dipahami sebagai konsep *opportunity cost or sacrifice cost*. Jadi setiap peluang yang hilang selama seseorang mengikuti pendidikan sama dengan hilangnya kesempatan atau peluang yang seharusnya digunakan untuk menghasilkan uang, karena selama mengikuti pendidikan, ia masih memiliki *private cost* seperti biaya pendidikan, buku, seragam, peralatan dan lain sebagainya.

Pernyataan tersebut, sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Supriadi (dalam Nurkhasanah, 2018) yang menyebutkan bahwa *private cost* adalah pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh setiap keluarga untuk pendidikan atau bisa juga disebut dengan pengeluaran rumah tangga *household expenditure*. Beliau juga menambahkan bahwa selain *private cost* ada juga biaya sosial (*social cost*). Biaya sosial merupakan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah.

Biaya pendidikan lain yang sering muncul selain *private cost* ialah *direct cost and indirect cost*. Menurut Fattah (dalam Aflaha et al., 2021) *direct cost* adalah biaya

yang langsung berproses dalam produksi pendidikan dimana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sementara *indirect cost* adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan. Blocher dkk (dalam Fironika, 2016) menambahkan bahwa setiap kategori biaya tersebut di atas, terdapat objek biaya yang berasal dari akumulasi aktivitas, untuk lembaga pendidikan sendiri objek biayanya adalah jasa.

Penulis mengambil kesimpulan setelah mengamati beberapa penjelasan diatas, bahwa biaya pendidikan secara akuntansi memiliki dua pencatatan di kedua sisi yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Biaya penerimaan didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh setiap tahun dari berbagai sumber-sumber resmi secara teratur, kemudian pengeluaran sendiri didefinisikan sebagai pembelanjaan yang dilakukan setiap tahun untuk keperluan pendidikan (Nurkhasanah, 2018).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa setiap pemasukan dan pengeluaran biaya pendidikan harus tercatat dalam jurnal akuntansi. Namun, perlu diketahui komponen apa saja yang dapat digolongkan sebagai biaya pemasukan dan biaya pengeluaran. Biaya pemasukan sumbernya telah disebutkan di atas yaitu dari pemerintah dan masyarakat, sementara untuk biaya pengeluaran Nurkhasanah (2018) menyebutkan kategorinya ke dalam beberapa item yaitu pengeluaran untuk pelaksanaan pelajaran, pengeluaran untuk tata usaha, pemeliharaan sarana dan prasarana, kesejahteraan pegawai, keperluan administrasi, pembinaan teknis dan pendataan.

Besaran biaya pendidikan yang harus dikeluarkan dihitung berdasarkan pada perhitungan biaya yang diperuntukkan untuk setiap kegiatan sesuai dengan jenis dan volumenya. Namun dari hasil kajian teori yang dilakukan oleh Fredi (Ping, 2021) menyebutkan bahwa jenis biaya pendidikan tergolong menjadi empat bagian yaitu *direct cost*, *indirect cost*, *monetary* dan *non-monetary cost*. Beliau juga menambahkan bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional, Pasal 32 Ayat 2 menyebutkan bahwa Biaya Pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Pengertian biaya investasi dalam Ayat 2 Pasal 32 tersebut ialah investasi lahan, penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap. Sementara biaya operasional meliputi biaya personalia dan non personalia.

Bagian penjelasan di atas yang perlu digaris bawahi oleh penulis ialah setiap perhitungan biaya pendidikan yang diperuntukkan untuk setiap kegiatannya sulit untuk diprediksikan, karena banyaknya faktor yang dapat menjadi pengganggu ketika biaya investasi pendidikan dan operasional pendidikan dideskripsikan ke dalam bentuk pelaksanaannya.

#### **Analisis Manfaat Biaya Pendidikan**

Melihat kondisi dari semua konsep biaya pendidikan tersebut, setelah itu sebagian orang tua dari peserta didik dapat memilih alternatif alokasi sumber-sumber pendidikan yang terbatas tetapi memberikan keuntungan yang tinggi.

Langkah terpenting yang perlu diketahui oleh sebagian orang tua siswa adalah melakukan analisis, salah satunya dengan memperhitungkan efisiensi biaya pendidikan. Istilah lainnya “lebih baik kalah dalam membeli tetapi menang dalam pemakaian”, artinya jika manfaat yang ditimbulkan lebih tinggi dari pada biaya yang dikeluarkan, maka biaya yang dikeluarkan tidak ada persoalan. Sebaliknya, jika manfaat yang ditimbulkan lebih kecil dari pada biaya yang dikeluarkan, maka pilihannya lebih baik tidak sama sekali.

Penjelasan tersebut sejalan dengan teori *human capital* yang berasumsi bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan (Atmanti, 2005). Jika orang tua menyekolahkan anaknya selama satu tahun, maka secara otomatis kemampuan kerja nantinya akan meningkat dan mempengaruhi tingkat penghasilan. Namun selama satu tahun tersebut, penghasilan yang didapatkan akan tertunda karena mengikuti sekolah dan selama mengikuti sekolah peserta didik juga dikenakan biaya secara langsung.

Pernyataan diatas secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang diterima seumur hidup dapat dihitung dalam nilai sekarang/*net present value*. Rumus untuk menghitung penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:

$$PV = \frac{FV_n}{(1+I)^N}$$

Keterangan:

PV = Nilai sekarang atau Jumlah Awal.

FV<sub>n</sub> = Nilai masa depan atau jumlah akhir dari akun Anda setelah periode N. Jika PV adalah nilai sekarang, maka FV<sub>n</sub> adalah nilai periode N di masa depan setelah bunga yang diterima dan ditambahkan ke dalam akun.

I = Tingkat bunga yang diterima per-tahun.

N = Jumlah periode waktu dalam analisis (Brigham & Houston, 2010)

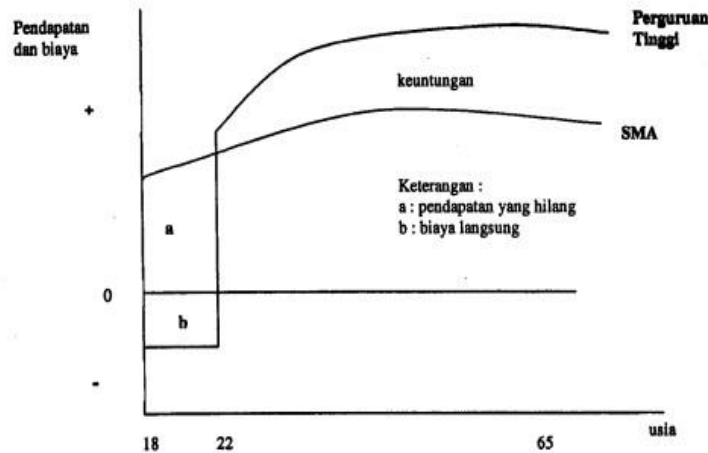
Penjelasan tersebut dapat dijumpai dalam salah satu topik pembahasan manajemen keuangan yang berbicara tentang investasi, seperti telah diketahui secara umum bahwa investasi dapat dihubungkan dengan pendidikan. Khususnya berbicara pada aspek peningkatan mutu sumber daya manusia.

Pelaksanaan aspek peningkatan mutu sumber daya manusia memerlukan waktu yang cukup lama, karena memerlukan waktu yang cukup lama, maka dalam kajian manajemen keuangan. Hal tersebut, dapat digolongkan ke dalam salah satu investasi pada faktor produksi. Pada saat itu digolongkan ke dalam salah satu bagian investasi, maka yang perlu diperhatikan manfaatnya atau dalam istilah keuangan disebut dengan *rate of return*. Manfaat tersebut dapat diartikan sebagai penghasilan yang akan diterima di masa depan setelah lulus dari sekolah atau perguruan tinggi.

### **Keputusan Berinvestasi**

Berdasarkan perspektif investasi yang diuji oleh Atmanti menyebutkan bahwa keputusan untuk langsung bekerja maupun melanjutkan kuliah di perguruan tinggi

didasarkan pada keuntungan yang diterimav dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan selama melanjutkan kuliah di perguruan tinggi (Atmanti, 2005). Hal senada juga dikemukakan oleh Kaufman dan Hotchkiss dalam Roberts & Brown (1963) bahwa keuntungan dan biaya jika melanjutkan kuliah di perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2. Keuntungan dan Biaya jika melanjutkan kuliah di Perguruan Tinggi**

Sumber: Roberts & Brown (1963)

Gambar 2 dijelaskan oleh Atmanti (2005) bahwa ada dua strategi untuk berinvestasi. Pertama, menyelesaikan sekolah di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) pada usia 18 tahun kemudian pada usia tersebut, keputusan yang diambil ialah langsung bekerja sampai dengan usia 65 tahun. Strategi Kedua, melanjutkan kuliah di perguruan tinggi setelah lulus SMA, kemudian di usia 22 tahun baru melanjutkan bekerja sampai usia 65 tahun.

Kedua strategi tersebut, pada kenyataannya memberikan gambaran yang sifatnya alternatif dalam mengambil keputusan berinvestasi di bidang pendidikan, sebab pendidikan dalam kajian ekonomi termasuk dalam kebutuhan sifatnya tersier, artinya jika kebutuhan pokok dan sekunder telah terpenuhi maka sebagian orang akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersier tersebut.

### **Biaya Langsung dan *Opportunity Cost***

Penjelasan tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk melanjutkan kuliah di perguruan tinggi, terdiri dari dua jenis biaya. Pertama biaya langsung yang dikeluarkan, sementara jenis biaya yang kedua adalah *opportunity cost*.

### **Biaya Langsung**

Menurut Anwar dalam Kelly (2020) menyebutkan bahwa biaya langsung merupakan pengeluaran uang secara langsung yang membiayai jalannya proses penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses

pendidikan. Biaya pendidikan juga dapat dikatakan sebagai biaya yang secara langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan biaya rutin. Biaya rutin merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya ini digunakan untuk menunjang pelaksanaan program pengajaran, pembayaran gaji guru, personil sekolah, administrasi kantor, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana sekolah.

Gaffar menambahkan bahwa biaya langsung dihitung berdasarkan per *student enrolled* (per siswa terdaftar) (Ferdin, 2013). Perhitungan yang dilakukan agar dapat berjalan dengan tepat dan akurat, maka Fontanella, Sukartini, & Meuthia (2013) dalam studinya menyebutkan turunan biaya langsung yang terdiri dari biaya sumber daya manusia, biaya depresiasi dan bahan habis pakai. Beliau juga menambahkan bahwa untuk menghitung biaya sumber daya manusia, efektifnya menghitung gaji dosen per jam kemudian dijumlahkan dengan tarif untuk masing-masing aktivitas utama yang memiliki konsekuensi untuk dibayarkan honorariumnya, seperti menguji ujian tugas akhir dan lain sebagainya. Sementara untuk biaya depresiasi dan gedung dihitung dengan cara total biaya depresiasi dibagi jumlah jam efektif per tahun. Hasil perhitungan tersebut dapat diketahui seberapa besar biaya pendidikan yang harus dibebankan. Selanjutnya, untuk biaya bahan habis pakai yang digunakan untuk proses pengajaran yang bersifat teori dapat dihitung dengan cara total bahan habis pakai per 1 kali kegiatan dibagi dengan jumlah mahasiswa untuk 1 kali kegiatan. Selanjutnya untuk menghitung biaya bahan habis pakai yang digunakan untuk praktikum dapat dihitung sesuai dengan kebutuhan untuk 1 kali praktikum per mahasiswa sesuai dengan kurikulum yang ada pada masing-masing program studi.

Besaran biaya honor per kegiatan dapat diketahui dengan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurkhasanah (2018) menyebutkan bahwa biaya langsung umumnya berasal dari SPP dan sumbangan orang tua atau biaya yang dikeluarkan langsung oleh peserta didik untuk membeli perlengkapan guna menunjang proses pelaksanaan pendidikan.

### **Opportunity Cost**

Fattah (2008) dalam penelitiannya menyebutkan konsep *opportunity cost* lebih luas dari konsep *money cost*, karena tidak hanya mencakup uang saja, tetapi juga mencakup pada sumber daya riil yang direpresentasikan dengan pengeluaran uang, walaupun produk tersebut tidak dibeli atau tidak dijual. Contohnya, seperti nilai waktu yang dimiliki oleh seorang peserta didik yang memilih untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi, sama dengan kesempatan yang hilang ketika memilih untuk langsung bekerja.

Jadi, *opportunity cost* dapat diukur dari biaya yang dikeluarkan oleh seorang peserta didik seperti biaya pendidikan, buku dan peralatan dan biaya kepada masyarakat seperti biaya gaji guru dan staf, buku, peralatan, bahan mentah dan gedung. Namun dalam praktiknya analisis biaya pendidikan sangat jarang



menggunakan analisis *opportunity cost* tetapi lebih kepada analisis pengeluaran uang.

Penelitian yang dilakukan oleh Atmanti (2005) menyebutkan bahwa *opportunity cost* sama dengan biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat seluruhnya sebagai akibat dari adanya keinginan atau kesediaan masyarakat untuk membayar beban biaya pendidikan saat memilih untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi. Biaya yang dimiliki dapat menjadi produktif apabila digunakan atau dimanfaatkan pada sektor-sektor ekonomi yang lain.

Jadi setiap kesempatan atau peluang yang telah diciptakan dari hasil pendidikan yang didapatkan memiliki nilai yang lebih tinggi. Namun secara tidak langsung mempengaruhi biaya sosial yang ditanggung oleh masyarakat. Menurut Todaro & Smith (2011) masyarakat harus menanggung biaya sosial yang timbul akibat memburuknya alokasi sumber daya yang pada akhirnya akan mengakibatkan menyusutnya persediaan dana atau kesempatan untuk menciptakan kesempatan kerja secara langsung atau melaksanakan program kerja lain, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi paradigma dalam melihat perguruan tinggi yang selama ini dijadikan alat menjadi berubah.

Penjelasan tersebut di atas, secara tidak langsung menunjukkan bahwa munculnya biaya sosial ke dalam skema pembiayaan pendidikan menjadi salah satu bagian penting untuk dijadikan tolak ukur efektivitas sebuah investasi di bidang pendidikan, dengan kata lain subsidi untuk bidang pendidikan yang bersumber dari masyarakat dan diperuntukkan oleh setiap peserta didik seharusnya dinilai efektif untuk masyarakat di masa yang akan datang, atau setiap output pendidikan nantinya akan kembali kepada masyarakat.

Selain berdampak kepada masyarakat, investasi yang baik juga memberikan dampak secara individu, salah satunya pendapatan yang diperoleh atau akses untuk lapangan kerja yang layak juga dapat dirasakan oleh individu di masa yang akan datang. Pernyataan tersebut sejalan dengan Wicaksono yang menyatakan bahwa besarnya manfaat pendidikan tinggi terhadap pembangunan ekonomi dapat dilihat dari dua aspek yaitu: Pertama, peningkatan nilai manfaat yang diakibatkan oleh sisi penawaran, yang belum mencapai titik keseimbangan atau titik jenuh, karena belum mencapai titik keseimbangan maka setiap unit penawaran harus terus ditingkatkan dengan memberikan *return* yang positif. Kedua, perubahan struktur ekonomi khususnya permintaan akan tenaga kerja yang berasal dari perguruan tinggi menjadi semakin besar sehingga mendorong lulusan dari kelompok lain terpaksa menerima tingkat upah di atas tingkat upah yang kompetitif. Sehingga dari tingkat upah yang tinggi tentunya akan memperbesar sumbangan pada negara dalam bentuk pajak (Wicaksono, 2004).

Kesimpulan yang dapat ditarik Berdasarkan penjelasan di atas ialah analisis biaya manfaat dalam sudut pandang keuangan direpresentasikan dalam bentuk rasio antara *present value* dari biaya dengan *present value* dari manfaat yang akan

didapatkan pada masa yang akan datang. Hal senada juga dikemukakan oleh Fattah (2008) dalam penelitian yang dilakukan, dan menyimpulkan bahwa perhitungan investasi yang baik dimulai dengan melakukan kalkulasi sejauh mana keuntungan yang didapatkan oleh setiap individu atau keluarga saat memilih melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi atau dengan kata lain memilih untuk melakukan investasi di bidang pendidikan.

Jika keuntungan ekonomi diukur dari pendapatan, maka semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin tinggi nilai pendapatan yang didapatkan. Namun jika istilah pendapatan dilihat dari sudut pandang pendidikan, maka sulit untuk diukur, karena istilah pendapatan tersebut dapat diartikan sebagai pendapatan dalam bentuk uang/penghasilan atau pendapatan dalam bentuk status sosial di tengah-tengah masyarakat.

### **Kesesuaian Investasi dan Kondisi Pendidikan di Indonesia**

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa investasi di bidang pendidikan memiliki banyak fungsi salah satunya di bidang ekonomi atau keuangan. Pada bidang ekonomi atau keuangan investasi pendidikan direpresentasikan dengan banyaknya waktu sekolah demi mendapatkan upah yang lebih baik dibandingkan dengan kurangnya waktu sekolah demi upah. Menurut Tobing (dalam Atmanti, 2005) menyebutkan bahwa jika upah mencerminkan produktivitas, maka semakin tinggi pendidikan semakin tinggi produktivitasnya dan upah yang diterima.

Penjelasan di atas mendeskripsikan seperti apa kondisi dan peluang investasi pendidikan untuk saat ini. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustang, Mutiara, & Asrifan (2021) menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin memburuk, penjelasan tersebut dibuktikan dengan rendahnya kualitas guru yang belum memiliki profesionalisme yang cukup memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa salah satu profesionalisme guru ialah Mampu untuk Merencanakan Pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian dan melakukan pengabdian masyarakat. Selain itu penjelasan beliau juga didukung oleh data persentase guru menurut kelayakan mengajar dalam tahun 2002-2003 di berbagai satuan pendidikan yaitu: untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) guru yang layak mengajar hanya 21,07% di tingkat negeri sementara untuk swasta hanya 28,94%, kemudian untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada di angka 54,12% untuk negeri dan 60,99% untuk swasta, selanjutnya untuk di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) berada pada angka 65,29% untuk Negeri dan 64,73% untuk Swasta, sementara untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) persentase guru yang layak mengajar ialah 55,49% untuk yang berstatus negeri dan 58,265% untuk yang berstatus swasta.

Rendahnya kualitas guru menyebabkan rendahnya prestasi peserta didik, pernyataan tersebut juga diakui oleh Fajri dan Afriansyah (dalam Hermiyanty,

Wandira Ayu Bertin, 2017) dalam penelitian yang dilakukan menyebutkan bahwa rendahnya kualitas guru di Indonesia juga berimbas pada pencapaian prestasi siswa sehingga pencapaiannya menjadi tidak maksimal. Hal senada juga dikemukakan oleh Supit, *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa rendahnya prestasi belajar siswa berkaitan dengan kemampuan guru yang tidak berkualitas, penjelasan tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh *Internasional Association for the Evaluation of Educational Achievement Study Center Boston Ebut* yang mengambil 600.000 siswa dari 63 negara terhadap *trends in mathematics and science study*; Indonesia diwakili oleh siswa kelas VIII tahun 2011. Hasil penilaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dalam bidang matematika berada di urutan ke 38 dengan skor 386 dari 42 negara yang siswanya dites. Skor yang didapat menunjukkan bahwa Indonesia turun 11 angka dari penilaian Tahun 2007. Peringkat pertama diraih dari siswa yang berasal dari Korea, diikuti siswa yang berasal dari Singapura. Sementara di bidang sains Indonesia berada di urutan 40 dari 42 negara.

Selain rendahnya kualitas guru dan rendahnya prestasi siswa, pendidikan di Indonesia saat ini juga tergolong mahal. Mahalnya pendidikan mengindikasikan bahwa pendidikan tersebut bermutu, asumsi tersebut memang layak untuk dijustifikasi mengingat bahwa biaya pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi membuat masyarakat miskin berpikir untuk tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustang *et al.* (2021) menunjukkan fakta bahwa untuk masuk TK dan SD, orang tua harus mempersiapkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000,- dan bahkan ada oknum yang memungut di atas Rp 1.000.000,- Setelah itu untuk melanjutkan ke SLTP/SLTA bisa orang tua menyiapkan biaya pendidikan sekitar Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-

Hasil penelitian tersebut, secara tidak langsung mengakui bahwa untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas diperlukan biaya yang tidak sedikit. Tetapi untuk membayar biaya pendidikan yang berkualitas tersebut, apakah dibebankan kepada pemerintah atau masyarakat, karena di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun kenyataan tersebut sangat jauh, justru pemerintah yang ingin melepaskan diri dari tanggung jawab tersebut.

Asumsi tersebut, didukung oleh kenyataan di lapangan, bahwa pemerintah sudah sering mengeluarkan kebijakan yang bersifat kontroversi, seperti pemerintah sementara membuat Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) yang mengakibatkan terjadinya perubahan status. Terjadinya perubahan status tersebut, memudahkan pemerintah untuk melemparkan tanggung jawab kepada badan hukum. Badan Hukum Pendidikan nantinya akan berdampak pada melambungnya biaya pendidikan khususnya pada lembaga pendidikan yang bersifat

favorit. Istilah lembaga pendidikan yang sifatnya favorit, memiliki konotasi pada kata privatisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Musayyidi (2020) menyebutkan bahwa privatisasi pendidikan yang dilakukan pemerintah menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan kepada pasar kerja. Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustang et al. (2021) yang menyebutkan bahwa rencana pemerintah untuk melakukan privatisasi pendidikan dilegitimasi melalui Pasal 53 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Pasal tersebut didalamnya disebutkan bahwa penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.

Secara umum istilah privatisasi sering dijumpai dalam kajian manajemen keuangan khususnya pengalihan aset seperti pengelolaan modal. Pengelolaan modal yang baik ditandai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas demi perputaran modal. Kaitannya dengan aspek pendidikan, privatisasi dapat diartikan sebagai penambahan investasi di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Artinya pemerintah memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

## **PENUTUP/SIMPULAN**

Untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dibutuhkan dana yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat, jadi pendidikan yang berkualitas itu mahal. Mahalnya biaya pendidikan mengharuskan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan investasi. Keputusan investasi yang diambil menandakan bahwa biaya pendidikan yang dikeluarkan memiliki manfaat. Analisis manfaat biaya pendidikan direpresentasikan dalam bentuk rasio antara *present value* dari biaya dengan *present value* dari manfaat yang akan didapatkan pada masa yang akan datang.

Di sisi lain, mahalnya biaya pendidikan mengindikasikan adanya privatisasi dalam pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah. Privatisasi di bidang pendidikan mengakibatkan lembaga pendidikan memiliki otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan, tingginya biaya penyelenggaraan pendidikan apakah dibebankan kepada pemerintah atau masyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *MASILE*, 1(1), 24-59. di akses pada tanggal 10 Januari 2022 dari <http://jurnal.staima.ac.id/index.php/masile/article/view/27>

- Agustang, A., Mutiara, I. A., & Asrifan, A. (2021). Masalah Pendidikan di Indonesia. OSF Preprints, 0–19. di akses pada tanggal 15 Februari dari <https://doi.org/10.31219/osf.io/9xs4h>
- Arwildayanto, nina lamatenggo, W. tune sumar. (2017). Keuangan, Manajemen Pendidikan, Pembiayaan (Ujang Kuswandi, Ed.). Bandung: Widya Padjadjaran.
- BPS. (2022). Persentase Penduduk Buta Huruf Menurut Kelompok Umur, 2011-2019. Website resmi Badan Pusat Statistik di akses pada tanggal 7 Januari 2022 dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1056>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). Dasar-dasar Manajemen Keuangan. In T. E. S. Empat (Ed.), 2010 (11th ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Diana, P. (2019). Efektivitas dan Efisiensi dalam Pembiayaan Pendidikan. Universitas Negeri Padang di akses pada tanggal 18 Desember 2021 dari <https://osf.io/preprints/inarxiv/6cbne/download>
- Dwi Atmanti, H. (2005). Investasi Sumber Daya Manusia melalui Pendidikan. Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 2(Nomor 1), 30–39. di akses pada tanggal 13 Februari 2022 dari <http://eprints.undip.ac.id/16864>
- Fattah, N. (2008). Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris. Jurnal Pendidikan Dasar, 2(April), 417–436. di akses pada tanggal 31 Desember 2021 dari [https://www.academia.edu/download/54535380/Pembiayaan\\_Pendidikan\\_Landasan\\_Teori\\_dan\\_Studi\\_Empiris.pdf](https://www.academia.edu/download/54535380/Pembiayaan_Pendidikan_Landasan_Teori_dan_Studi_Empiris.pdf)
- Ferdi, W. P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis. Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan, 19(4), 565–578. di akses pada tanggal 19 Januari 2022 dari <https://doi.org/10.24832/jpnk.v19i4.310>
- Fironika K, R. (2016). Pembiayaan Pendidikan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, 8, 161–167. di akses pada tanggal 18 Januari 2022 dari <http://dx.doi.org/10.30659/pendas.2.1.43-64>
- Fontanella, A., Sukartini, N. C., & Meuthia, R. F. (2013). Perhitungan Tarif Biaya Satuan (Unit Cost) Penyelenggaraan Pendidikan pada Politeknik Negeri Padang. Prosiding Simposium Nasional Akuntansi Vokasi Ke, 2, 69, 1689-1699 dari <https://scholar.google.com/> .
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Kualitas Pendidikan di Indonesia. Journal of Chemical Information and Modeling, 8(9), 1–58. di akses pada tanggal 15 Februari 2022 dari <https://media.neliti.com/media/publications/210331-analisis-permasalahan-guru-terkait-peran.pdf>
- Iskandar, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan. Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 3(1), 114–123. di akses pada

- tanggal 21 Maret 2022 dari <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/view/8133>
- Kelly, T. P. M. F. (2020). Pembiayaan dalam Pendidikan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 1–6. di akses pada tanggal 18 Januari 2022 dari <https://doi.org/10.1002/j.0022-0337.1981.45.4.tb01452.x>
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan (Cetakan II; R. Kusumaningrate, Ed.)*. Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Musayyidi, M. (2020). Menyoal Komersialisasi Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kariman*, 8(1), 125–140. di akses pada tanggal 16 Februari 2022 dari <https://doi.org/10.52185/kariman.v8i1.134>
- Najihah, I., & Muhammad, S. H. (2021). Konsep Manajemen Keuangan dalam Lembaga Pendidikan Islam Perspektif al Qur'an dan Hadis. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 223–239. di akses pada tanggal 21 Maret 2022 dari <https://doi.org/10.24252/idaarah.v5i2.21616>
- Nurkhasanah, N. (2018). Cost Benefit Analysis dalam Pendidikan. di akses pada tanggal 23 Januari 2022 dari <http://novanurkhasanah4.blogspot.com/2018/04/cost-benefit-analysis-dalam-pendidikan.html>
- Ping, T. (2021). Model Pembiayaan Pendidikan di Perguruan Tinggi pada Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Journal Of Education and Humanity*, 1(2), 107–119. di akses pada tanggal 25 Januari 2022 dari <http://ijoehm.rcipublisher.org/index.php/ijoehm/article/view/17>
- Roberts, R., & Brown, E. H. P. (1963). The Economics of Labor. *Southern Economic Journal*, 30(2), 183. di akses pada tanggal 14 Februari 2022 dari <https://doi.org/10.2307/1055968>
- Supit, M., Rawis, J. A. M., Wullur, M. M., & Rotty, V. N. J. (2021). Analisis Supervisi Pendidikan Untuk Pengembangan Profesionalitas Guru Berkelanjutan. *LEADERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(2), 87–107. di akses pada tanggal 15 Februari 2022 <https://doi.org/10.35719/leaderia.v2i2.68>
- Syauqi, A. (2009). Analisa implementasi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945 tentang Pemenuhan Anggaran Pendidikan 20 Persen. Universitas Gadjah Mada. di akses pada tanggal 22 November 2021 dari [http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail\\_pencarian/41110](http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/41110)
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. in *Economic Development* (11th ed.; D. Battista, Ed.). Amerika Serikat: Pearson UK.
- Wicaksono, T. Y. (2004). Besarkah Manfaat Pendidikan Tinggi terhadap Pembangunan Ekonomi? CSIS. di akses pada tanggal 14 Februari 2022 dari [Http://Www.Csis.or.Id/Scholars\\_opinion.Asp](Http://Www.Csis.or.Id/Scholars_opinion.Asp).